



PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN: STRATEGI PENGEMBANGAN DESA BERBASIS KETERKAITAN DESA-KOTA

RURAL AREA DEVELOPMENT PROGRAM: RURAL-URBAN LINKAGES DEVELOPMENT STRATEGY

Firda Diartika^{a*}, Retno Widodo Dwi Pramono^a

^aUniversitas Gadjah Mada; Yogyakarta

*Korespondensi: firdadiartika@gmail.com

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 26 November 2020
- Artikel diterima: 5 Februari 2021
- Tersedia Online: 8 Desember 2021

ABSTRAK

Desa merupakan wilayah yang berdaulat yang diperkuat sejak hadirnya UU Desa. Pembangunan perdesaan sejak dahulu diupayakan melalui berbagai bentuk kebijakan dan program yang memiliki tujuan untuk mendayagunakan seluruh potensi sumber daya secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu pendekatan pembangunan yang terdapat dalam UU. 6/2014 Tentang Desa adalah pembangunan perdesaan terintegrasi yang dapat disebut Program Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP). Perbedaan karakteristik wilayah pembangunan, model pendekatan dan beberapa karakteristik lainnya pada program ini menambah khasanah praktik pembangunan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik program PKP atau program pembangunan kawasan perdesaan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deduktif dan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei instansional dan pengamatan lapangan. Analisis data menggunakan analisis konten dan diperkuat dengan teknik triangulasi data. Hasil pengelitan menunjukkan bahwa program PKP masuk pada strategi pengembangan wilayah keterkaitan desa-kota dengan karakteristik desa sasaran program merupakan desa berkembang dengan aksesibilitas baik ke kota, ketersediaan sarana prasarana memadai, terdapat kegiatan industri kecil dan menengah yang bergantung pada produk pertanian lokal serta terdapat jaringan produksi-distribusi dan pertukaran ekonomi dari tingkat desa hingga kota. Karakteristik penyampaian program PKP bersifat gabungan antara bottom up dan top down dengan sistem kelembagaan dan pendanaan bersifat multi pihak serta kelembagaan lokal sebagai pelaksana utama.

Kata Kunci: Kawasan Perdesaan, Karakteristik Program, Pembangunan

ABSTRACT

The village is a sovereign area that has been strengthened since the introduction of the Village Law. Rural development has always been pursued through various forms of policies and programs that aim to utilize all potential resources optimally to improve the welfare of rural communities. One of the development approaches in the Village Law is integrated rural development, called the rural area development program (PKP). The different characteristics of development areas, approach models, and several other characteristics in this program add to the repertoire of rural development practices. This study aims to identify the characteristics of the PKP program or rural area development program. This research approach is a deductive approach and qualitative research methods. Data was collected through institutional surveys and field observations. Data analysis uses content analysis and is strengthened by data triangulation techniques. The results of the study show that the PKP program or rural area development is included in the strategy of developing rural-urban linkages with village characteristics. The program target is a developing village with good accessibility to the city, the availability of adequate infrastructure, there are small and medium industrial activities that depend on local agricultural products, and there is a network of production and distribution and economic exchange from the village to the city level. The characteristics of the PKP program delivery are a combination of bottom-up and top-down with a multi-stakeholder institutional and funding system and local institutions as the main implementors.

Keyword: Rural Area, Program Characteristic, Development

1. PENDAHULUAN

Desa dan Perdesaan memiliki banyak potensi terutama potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai modal dalam peningkatan ekonomi apabila dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan perdesaan sejak dahulu diupayakan melalui berbagai bentuk kebijakan dan program yang memiliki tujuan untuk mendayagunakan seluruh potensi sumber daya secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perkembangannya, pembangunan perdesaan yang telah dilaksanakan sejak dari dahulu hingga sekarang belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan (Muta'ali, 2016).

Secara sosial ekonomi dan lingkungan, desa memiliki hubungan dinamik dengan wilayah lainnya khususnya kota. Faktanya pola kebijakan yang bias kota membuat hubungan tersebut berlangsung tidak seimbang sehingga wilayah perdesaan menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan tujuan pengembangan wilayah perdesaan yang produktif, berdaya saing, dan nyaman (Muta'ali, 2016). Berdasarkan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (2018) per September 2017 yang dikeluarkan BPS, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar yaitu 16,31 juta jiwa atau 13,47% dibanding perkotaan sebesar 10,27 juta jiwa atau 7,26%. Permasalahan lainnya terkait SDM perdesaan didominasi oleh lulusan SD sejumlah 57%. Tidak cukup kemiskinan dan pendidikan, masalah lain terkait rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan khususnya aset tanah, modal dan sumberdaya. Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan perdesaan membuat berbagai potensi dan kekayaan sumber daya alam di perdesaan masih belum optimal pemanfaatannya untuk menopang perekonomian perdesaan. Selain ketidakberdayaan desa, fenomena *backwash effect* menambah masalah baru akibat terkurasnya sumberdaya perdesaan oleh kota. Kondisi perdesaan dan perkotaan yang mengalami kesenjangan pembangunan menjadikan tingkat urbanisasi tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut United Nations (2014) menyatakan sejumlah 53% masyarakat Indonesia tinggal di daerah perkotaan dan diprediksi akan meningkat hingga 70% pada tahun 2050.

Berbagai permasalahan yang terjadi di perdesaan membutuhkan penanganan berupa strategi pembangunan yang dapat mengurai permasalahan tersebut. Menurut Zhu, et al (2019), keseimbangan hubungan desa kota tercapai apabila terdapat fasilitasi kebijakan pemerintah terkait. Selain itu pembangunan desa juga dipengaruhi oleh peran masyarakat lokal (Dinis, 2019). Keterlibatan pihak lainnya juga menjadi penting seperti menurut Barraket, et al. (2017) menunjukkan bahwa peran positif organisasi pemerintah dan kewirausahaan sosial juga berpengaruh terhadap desa utamanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan. Perlibatan berbagai pihak dan peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan sebagai subyek pembangunan digunakan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam perdesaan guna meningkatkan perekonomian desa. Seiring perkembangan waktu, muncul berbagai strategi dan model pembangunan perdesaan. Di Indonesia sendiri program pembangunan desa sudah diwujudkan dengan berbagai model. Mutaali (2016) menyebutkan bahwa tipologi model spasial pembangunan wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu model pusat pertumbuhan sebagai pendalaman pendekatan pembangunan dari atas, model desentralisasi teritorial sebagai pendalaman pendekatan pembangunan dari bawah, dan model integrasi spasial yang mencoba mengintegrasikan dua model sebelumnya dengan memperhatikan model hubungan antara desa dan kota. Tipologi model spasial pembangunan tersebut dapat diidentifikasi melalui karakteristik implementasi kebijakan/program berupa karakteristik sasaran program (dalam hal ini “desa lokasi”) dan karakteristik penyampaian program.

Arah kebijakan pembangunan desa kemudian dilahirkan kembali ditandai dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur mengenai desa. Lahirnya UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa perubahan cukup signifikan bagi pembangunan desa. Pembangunan desa dalam Undang-Undang tentang Desa membagi 2 (dua) pendekatan pembangunan desa, yaitu “desa membangun” yang ditujukan pada pembangunan skala lokal desa (pembangunan desa) dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih luas dan fungsional dalam bentuk program pembangunan kawasan perdesaan. Adisasmitha (2010) menyatakan kebijakan pembangunan melalui pendekatan kawasan mengarah pada tercapainya fungsi tertentu, pembangunan berbagai sektor yang saling terkait dan mendukung, serta berbagai kegiatan pembangunan yang lebih terfokus dan terpadu diharapkan mampu untuk mendorong tercapainya sasaran pembangunan dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Maulana (2015) menyatakan bahwa kekhususan karakteristik program pembangunan kawasan adalah pada pendekatannya yang berifat partisipatif sehingga cenderung memiliki pendekatan pembangunan dari bawah.

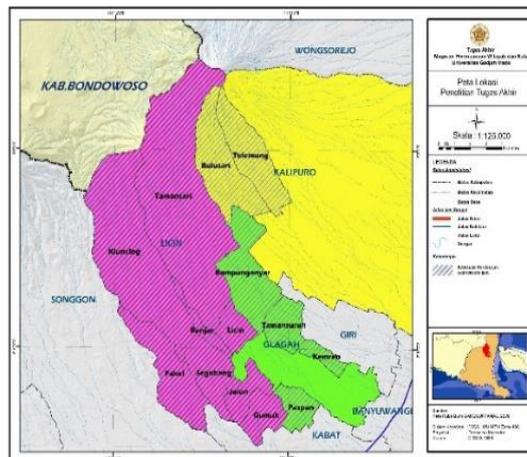
Pembangunan kawasan perdesaan dinilai menjadi sebuah model baru pembangunan wilayah perdesaan baik dari segi skala spasial maupun skala ekonomi yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi karakteristik sasaran dan penyampaian program pembangunan kawasan perdesaan sehingga dapat pula diidentifikasi tipologi model spasial pembangunan wilayah dari program tersebut.

2. DATA DAN METODE

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deduktif dengan metode kualitatif. Pendekatan deduktif dilakukan dengan studi literatur teknikal yaitu literatur yang menyediakan latar dari suatu materi yang membandingkan temuan dari data aktual yang didapatkan dan memiliki fungsi yang spesifik seperti memberikan teori dan konsep kerangka yang dapat digunakan sebagai pedoman (Creswell, 2009). Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen, Kabupaten Banyuwangi. Kawasan Perdesaan ini terdiri dari 14 desa yang saling berbatasan dan terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Glagah, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Kalipuro (peta lokasi studi terdapat pada Gambar 1). Melalui kesepakatan bersama antar desa, desa-desa tersebut bergabung menjadi kesatuan kawasan perdesaan dengan kesamaan potensi unggulan (sektor/komoditas). Program pembangunan kawasan perdesaan pada Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi dan komoditas unggulan kawasan unggulan, oleh karena itu implementasi program ini berfokus pada pengembangan kelembagaan dan pengembangan potensi dan komoditas unggulan (mekanisme hulu-hilir). Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen, difungsikan sebagai kawasan penyangga wisata Kawah Ijen sehingga komoditas unggulan yang dikembangkan merupakan komoditas pendukung pariwisata yaitu perkebunan kopi rakyat, peternakan susu kambing PE, olahan makanan, *handycraft*, dan produk pendukung wisata lainnya. Kawasan perdesaan ini dipilih karena merupakan salah satu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yang masuk ke dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi satu-satunya Kawasan Perdesaan “Mandiri” melalui pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan oleh Ditjen PKP, Kementerian Desa PDTT.



Sumber: Analisis Penulis, 2020

Gambar 1. Peta Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen, Kabupaten Banyuwangi

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei primer dan survei sekunder. Survei primer melalui wawancara mendalam terhadap responden yaitu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Tingkat Kabupaten, TKPKP Tingkat Kawasan Perdesaan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Masyarakat Pelaku Ekonomi. Survei sekunder dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait pada berbagai instansi. Kebutuhan data dan metode pengumpulan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan dan Metode Pengumpulan Data

Tujuan	Kelompok Variabel	Variabel	Jenis Data	Sumber Data
Mengidentifikasi karakteristik program pembangunan kawasan perdesaan (PKP)	Karakteristik Desa Sasaran Program	Lokasi Desa	Data Sekunder	1. Dokumen RPKP 2017-2021 2. Data Podes 2018 3. Kecamatan Dalam Angka
		Sasaran	Data Sekunder	
		Basis Ekonomi Desa	Data Sekunder	
	Karakteristik Program	Pola Spasial	Data Sekunder	1. Dokumen RPKP Ijen Banyuwangi 2. Permendesa No. 5 Tahun 2016 3. Laporan Tahunan Program PKP
		Investasi	Data Sekunder	
		Karakteristik Penyampaian Program	Data Primer (Wawancara)	
Kelembagaan Pelaksana Program	Kelembagaan Pelaksana Program	Data Sekunder	1. Dokumen RPKP Ijen Banyuwangi 2. Dokumen Legalitas dan Struktur Kelembagaan Kawasan Perdesaan Ijen, Kabupaten Banyuwangi	
		Data Primer (Wawancara)		Hasil wawancara terhadap TKPKP Kabupaten Banyuwangi, Pendamping Desa, TKPKP Kawasan, dan Pemerintah Desa

Sumber: Analisis Penulis, 2020

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data berupa analisis konten dari materi yang terdokumentasi seperti buku, dokumen, peraturan perundangan, dan konten tertulis. Selain itu penulis juga melakukan teknik triangulasi sumber data yaitu pengecekan data untuk melihat sejauh mana data menggambarkan fenomena penelitian. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan hasil analisis konten yang berasal dari dokumen dengan hasil wawancara terhadap responden terpilih. Hasil analisis konten dan triangulasi data tersebut kemudian dijabarkan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan data yang diperoleh, analisis data, temuan-temuan yang spesifik serta hasil dan pembahasan dibagi menjadi karakteristik desa sasaran program dan karakteristik penyampaian program. Pada karakteristik desa sasaran program dilakukan identifikasi lokasi desa sasaran, basis ekonomi desa, pola spasial investasi dan pergerakan penduduk desa. Pada karakteristik penyampaian program dilakukan identifikasi karakteristik penyampaian dan kelembagaan pelaksana program.

a. Hasil Analisis

Lokasi Desa Sasaran

Program pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan agenda Nawacita 3 yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Salah satu sasaran dari agenda tersebut adalah peningkatan keterkaitan desa-kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri. Target afirmatif dari RPJMN 2015-2019 yaitu menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan desa dan kota. Sasaran lokus program pembangunan kawasan perdesaan adalah 39 pusat pertumbuhan yang tertuang pada dokumen RPJMN 2015-2019. Salah satu pusat pertumbuhan tersebut berada di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan arahan Kementerian PPN/Bappenas, pemilihan lokus desa program pembangunan kawasan perdesaan berada pada desa dengan indeks “berkembang” karena desa berkembang memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan, ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai serta mampu menjadi penggerak ekonomi bagi daerah/kawasan di sekitarnya. Sedangkan menurut UU Desa No 6 Tahun 2014 dan Permendesa No 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, karakteristik lokus kawasan perdesaan yaitu:

- a. terdiri dari desa-desa yang saling berbatasan;
- b. terletak dalam 1 kabupaten;
- c. memiliki kegiatan utama pertanian; dan
- d. memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan potensi atau masalah pengembangan.

Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen Kabupaten Banyuwangi terletak di 14 desa yang saling berbatasan dan berada pada Kabupaten Banyuwangi. Menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018 yang dikeluarkan Bappenas dan BPS, mayoritas desa pada KP Agrowisata Ijen memiliki indeks “Berkembang” dan 1 desa yaitu Desa Licin memiliki indeks Mandiri. Menurut Bappenas, konsep pemilihan desa dengan indeks berkembang dan mandiri dilakukan dengan maksud agar terjadi percepatan pembangunan pada kawasan perdesaan.

Tabel 2. Indeks Desa pada Kawasan Perdesaan Menurut IDM dan IPD 2018

Kecamatan		Desa	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	IDM 2018	IPD 2018
Licin	1	Pakel	2640	12,3	Berkembang	Berkembang
	2	Gumuk	2343	7,65	Maju	Berkembang
	3	Jelun	2477	6,24	Maju	Berkembang
	4	Segobang	5703	10,17	Maju	Berkembang
	5	Banjar	2519	9	Maju	Berkembang
	6	Licin	4143	4,67	Maju	Mandiri
	7	Kluncing	3314	18,83	Berkembang	Berkembang
	8	Tamansari	6827	100,39	Maju	Berkembang
Glagah	9	Kampung Anyar	4525	31,08	Berkembang	Berkembang
	10	Tamansuruh	4526	10,47	Berkembang	Berkembang
	11	Paspan	3540	6,94	Berkembang	Berkembang
	12	Kemiren	2588	2,97	Berkembang	Berkembang
Kalipuro	13	Telemung	4924	20,18	Berkembang	Berkembang
	13	Bulusari	4077	25,42	Berkembang	Berkembang

Sumber: Kecamatan dalam Angka 2019 dan Dokumen IPD 2018

Lokasi KP Ijen Banyuwangi terletak sekitar 20 km di barat daya pusat kota Kabupaten Banyuwangi. Karakteristik fisik desa sasaran dinilai melalui kondisi aksesibilitas dari pusat kota ke kawasan perdesaan. Pada KP Agrowisata Ijen akses dari kawasan ke pusat kota dinilai baik dengan kondisi jalan beraspal berdasarkan data Podes 2018. Selain aksesibilitas, ketersediaan prasarana dan sarana juga dinilai untuk melihat karakteristik fisik desa sasaran program. Berdasarkan pengolahan data Kecamatan Dalam Angka 2019, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peribadatan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat kawasan. Selain itu menurut Podes 2018, masyarakat juga menyatakan kemudahan dalam mengakses sarana tersebut. Prasarana air bersih, sanitasi dan sampah juga sudah memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat kawasan perdesaan.

Menurut BPS, karakteristik demografi desa sasaran dapat dinilai dari ukuran kepadatan penduduk. Berdasarkan data Kecamatan Dalam Angka 2019, sebagian besar kepadatan penduduk pada masing-masing desa di KP Agrowisata Ijen dibawah 500 jiwa/km² dengan rata-rata kepadatan seluruh wilayah kawasan perdesaan adalah 266 jiwa/km². Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan karakteristik demografis di KP Agrowisata Ijen masuk klasifikasi desa dengan kepadatan rendah.

Basis Ekonomi Desa

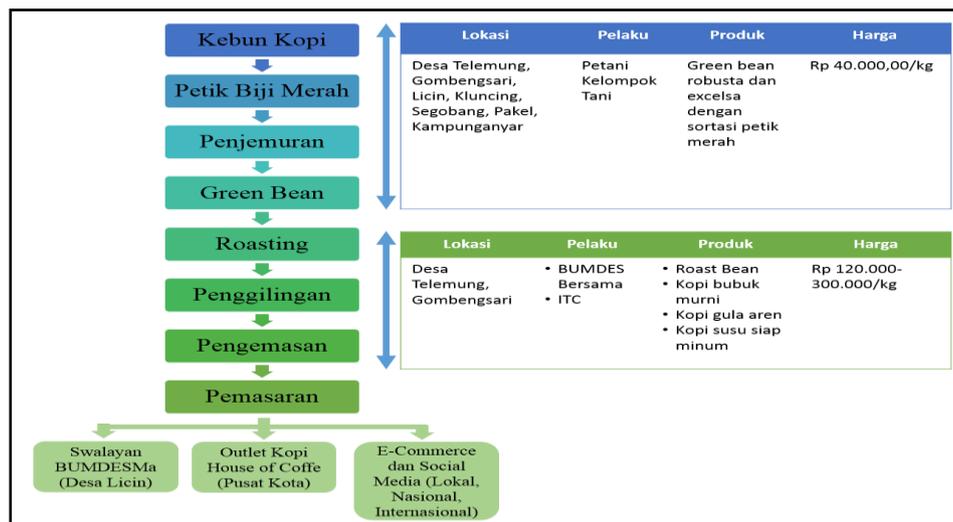
Definisi desa berdasarkan karakteristik ekonomi menurut beberapa pendapat ahli adalah suatu wilayah dengan basis ekonomi utama pertanian. Hal tersebut tercermin dari mata pencaharian sebagian besar penduduk yang bergantung pada sektor pertanian. Ciri-ciri desa mulai mengkota dengan adanya pergeseran mata pencaharian penduduk yang mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder. Berdasarkan data

Podes 2018, sumber penghasilan utama penduduk di Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen adalah pertanian. Perkembangan sektor pertanian, juga diimbangi dengan perkembangan sektor industri kecil dan menengah yang bergerak dalam pengolahan hasil alam lokal. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyuwangi jumlah industri kecil dan menengah di Kecamatan Licin sejumlah 1254 unit, sedangkan pada Kecamatan Kalipuro sejumlah 390 unit (Desa Telemung dan Desa Bulusari), serta pada Kecamatan Glagah sejumlah 1282 unit (Desa Kemiren, Paspan, Tamansuruh dan Kampunganyar). Menurut Seksi Pengembangan Perwilayahan dan Klaster Industri, Disperindag Banyuwangi, industri kecil dan menengah muncul sebagian besar akan adanya atau melimpahnya bahan baku di lokasi setempat. Pada Kawasan Perdesaan Ijen Banyuwangi, pengembangan komoditas unggulan masuk ke dalam kegiatan industri kecil menengah. Kondisi ini sejalan dengan rencana pengembangan komoditas unggulan yang tertuang pada Dokumen RPKP Ijen yang menyorot pada melibatkan pelaku ekonomi di tingkat petani dan pelaku industri kecil dan menengah.

Pola Spasial Investasi

Program pembangunan kawasan perdesaan berangkat dari kesamaan potensi atau masalah yang dimiliki oleh 2 atau lebih desa yang berbatasan. Relevansi pembangunan kawasan perdesaan salah satunya adalah sebagai upaya mendorong ekonomi bernilai tambah. Desa hanya memproduksi bahan baku disinyalir menjadi salah satu sumber ketertinggalan desa. Nilai tambah dari sektor pengolahan diupayakan dengan pemenuhan skala ekonomi (*economic of scale*) yang bisa dicapai dengan pembangunan di level kawasan perdesaan, bukan desa. Adanya skala ekonomi dalam mengembangkan potensi atau komoditas unggulan di kawasan perdesaan menjadikan investasi berfokus pada komoditas-komoditas tertentu yang sudah disepakati untuk dikembangkan. Hal tersebut juga berimplikasi pada rencana program pembangunan yang ada di dokumen RPKP serta implementasinya oleh berbagai stakeholder lintas sektoral maupun regional. Berdasarkan konsep pembangunan kawasan perdesaan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT, menyatakan bahwa salah satu fungsi kawasan adalah sebagai jembatan relasi desa-kota yang sulit dibangun secara rata karena ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Desa-desa diperkuat dengan jalan kolaborasi membentuk kawasan agar bisa berhubungan dengan kota secara seimbang. Produk kawasan perdesaan yang telah mencapai skala ekonomi mampu memenuhi permintaan pasar yang berasal dari kota. Keterkaitan desa kota dapat dicapai apabila peran desa sebagai produsen untuk memenuhi kebutuhan kota dan peran kota sebagai *market center* dari produk pertanian desa dapat secara optimal terpenuhi.

Pada proses pengembangan komoditas unggulan Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen, optimalisasi peran desa dan kota tercermin pada aliran produksi distribusi komoditas unggulan. Kawasan perdesaan memasok produk kopi yang dipasarkan salah satunya ke kota terdekat (pemasaran ke pusat Kabupaten Banyuwangi). Berikut merupakan alur jaringan produksi-distribusi komoditas unggulan kopi di Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen.

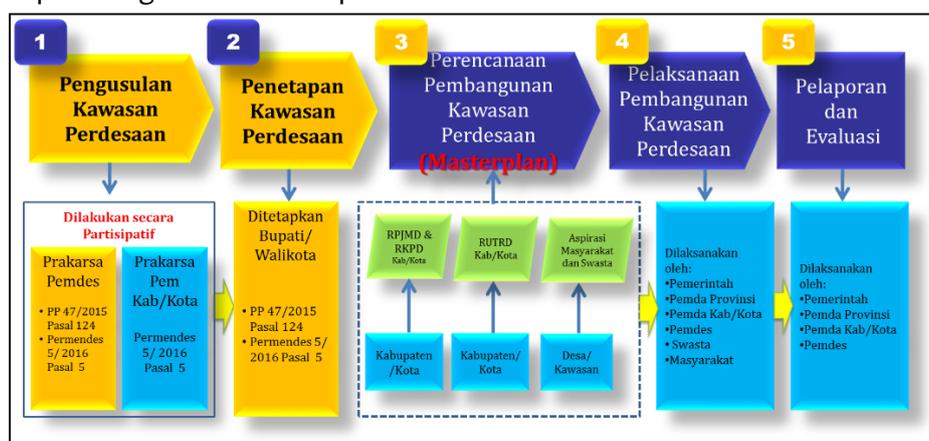


Sumber: Analisis Penulis, 2020

Gambar 2. Alur Jaringan Produksi Distribusi Komoditas Unggulan Kopi

Karakteristik Penyampaian Program

Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 83 ayat 2, Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan melalui **pendekatan partisipatif**. Menurut Eko (2015), pembangunan perdesaan merupakan kewenangan pemerintah namun partisipasi desa harus tetap dilibatkan atau bersifat partisipatif. Penekanan pendekatan partisipatif bertujuan agar masyarakat dan institusi lokal dapat menentukan pembangunan di wilayahnya secara mandiri serta terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan program pembangunan kawasan perdesaan. Dalam hal ini negara, desa, dan swasta dapat membangun kemitraan untuk membangun kawasan perdesaan yang memiliki orientasi pada pengembangan ekonomi lokal, pembukaan akses desa keluar, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bermuara pada pengurangan urbanisasi (Andari dan Ella, 2019). Proses pelibatan masyarakat dan pemerintah desa dimulai dari proses pengusulan kawasan perdesaan meliputi penetapan lokasi desa, penentuan potensi unggulan, dan penyusunan matriks indikasi program/kebutuhan pengembangan hingga pelaksanaan program. Berikut merupakan alur penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan.

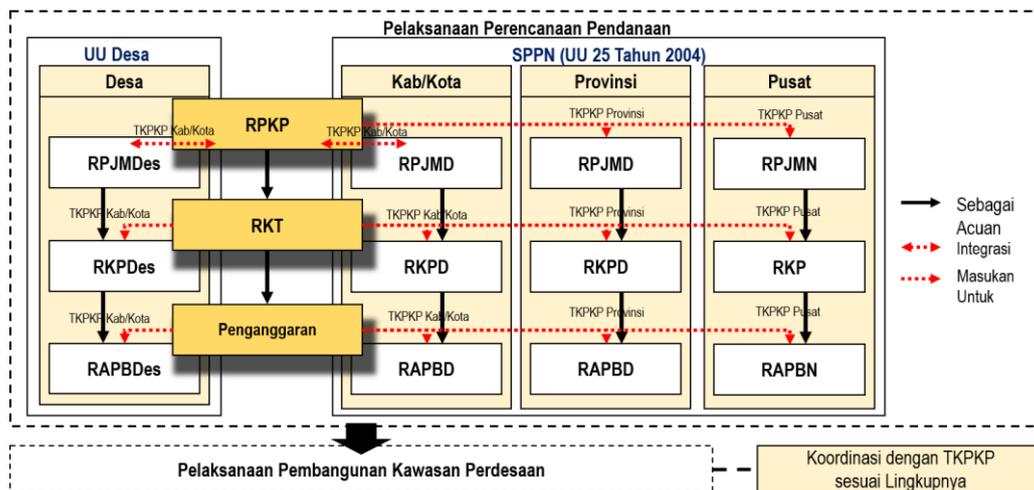


Sumber: Permendes No. 5 Tahun 2016

Gambar 3. Alur Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Berbeda dengan pembangunan desa dimana pelaku pembangunan didominasi oleh masyarakat dan pemerintah desa, pembangunan kawasan perdesaan memiliki pelaku pembangunan lebih beragam baik secara lintas sektoral maupun regional. Menurut Pasal 85 Ayat 1 UU. No. 6 Tahun 2014, Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh banyak pihak dari level Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah. Selain itu Pemerintah Desa dan/atau BUM Desa juga terlibat dalam pelaksanaan program PKP dengan mengikutsertakan masyarakat Desa secara aktif. Pada ayat 2 menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah dan masyarakat, namun pihak ketiga juga dapat diikutsertakan dalam pendayagunaan potensi SDA maupun SDM dalam rangka pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Hal tersebut berimplikasi pada proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran hingga monitoring serta evaluasi. Meskipun kewenangan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan ada pada pemerintah kabupaten/kota, namun pelaku pembangunan kawasan tidak terbatas dan bersifat multi sektoral dan regional.

Pada konteks pelaksanaan perencanaan dan pendanaan, pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional (UU. 25 Tahun) 2004 dan sistem penyelenggaraan pembangunan desa (UU. 6 Tahun 2014). Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Sehingga rencana pembangunan pada Kawasan Perdesaan dapat sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah di berbagai level. Hal tersebut juga berimplikasi pada pendanaan pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari berbagai sumber (APBN, APBD dan APBDes). Berikut merupakan gambar alur keterkaitan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional.



Sumber: Direktorat Jenderal PKP Kemendesa PDTT, 2018

Gambar 4. Keterkaitan PKP dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU. 25/2004) dan Pembangunan Desa (UU. 6/2014)

Apabila dilihat dari dua konteks sebelumnya, proses penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan menggunakan pendekatan gabungan antara *top down* dan *bottom up*. Pada tahap-tahap tertentu masyarakat dan pemerintah desa diberikan peran secara aktif untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan

pengambilan keputusan (*bottom up*) namun disisi lain berbagai arahan kebijakan, sistem perencanaan, penganggaran dan prosedural pelaksanaan masih bersifat *top down*.

Kelembagaan Pelaksana Program

Pada sisi kelembagaan, pembangunan kawasan perdesaan memiliki lembaga yang dinamai TKPKP atau Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. TKPKP adalah tim yang mengawal keseluruhan proses pembangunan kawasan perdesaan dan memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, mediasi dan *marketing* dalam hal pengusulan hingga pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. TKPKP terdapat pada tiga tingkat yaitu pusat, provinsi dan kabupaten. Pada TKPKP Pusat berisi para kementerian/lembaga terkait. Saat ini TKPKP Pusat dikomandoi oleh Kementerian Bappenas/PPN dengan anggota beberapa K/L terkait seperti Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, KKP, dll. TKPKP Pusat disahkan melalui Surat Keputusan Menteri. Namun sampai saat ini TKPKP Pusat belum memiliki legalitas pengesahan. Pada TKPKP Provinsi dipimpin oleh Sekda dan beranggotakan berbagai SKPD dengan pengesahan melalui Surat Keputusan Gubernur. Pada tingkat kabupaten, TKPKP disahkan melalui Surat Keputusan Bupati. TKPKP Kabupaten dipimpin oleh Sekda dan memiliki anggota berbagai SKPD seperti Bappeda, Dinas PMD, Dinas Perindustrian, dll. TKPKP Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 188/87/KEP/429.011/2018 tentang Pembentukan TKPKP Kabupaten Banyuwangi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, koordinasi antar tingkat bersifat timbal-balik.

Tabel 3. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kabupaten/Kota	Provinsi	Pusat
TKPKP Kabupaten/Kota	TKPKP Provinsi	TKPKP Pusat
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pengusulan • Penilaian (kajian) usulan • Koordinasi penetapan kawasan • Menunjuk pelaksana pembangunan KP • Melaksanakan arahan kebijakan hasil movevlap 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan • Pembinaan TKPKP di tingkat kabupaten/kota • Fasilitasi pelaksanaan PKP di kabupaten/kota • Monevlap (verifikasi dokumen RPKP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan • Membina TKPKP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Fasilitasi pelaksanaan PKP di kabupaten/kota • Movevlap (verifikasi dokumen RPKP)

Sumber: Permendesa No 5 Tahun 2016

Pada Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen, terdapat kelembagaan dibawah TKPKP Kabupaten, yaitu TKPKP Kawasan Agrowisata Ijen. TKPKP Kawasan diketuai oleh Kepala Bappeda dengan memiliki anggota kepala bidang berbagai SKPD, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, Camat, serta Kelompok Masyarakat. TKPKP Kawasan Agrowisata Ijen ditetapkan melauli SK Bupati Nomor 188/448/KEP/429.011/2018. Menurut petunjuk teknis pelaksanaan PKP, TKPKP Kawasan dibentuk dengan penyesuaian pada kebutuhan masing-masing kawasan. Pada Permendesa No. 5 Tahun 2016, pengaturan kelembagaan TKPKP hanya pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. TKPKP Kawasan merupakan perpanjangan tangan dari TKPKP Kabupaten dimana berisi unsur masyarakat kawasan dan diharapkan bersifat lebih teknis dan operasional di tingkat kawasan.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan melalui kelembagaan TKPKP memiliki unsur yang bersifat lintas sektoral maupun regional. Pelibatan berbagai kementerian/lembaga pada tingkat pusat dan berbagai SKPD pada tingkat daerah diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan secara optimal dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi perdesaan. Selain kelembagaan secara resmi, pelibatan multi pihak juga terlihat pada kemitraan dan pengembangan kerjasama dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Ijen yang sudah terjalin dengan beberapa instansi dan individu (ahli) sebagai berikut:

- a. Kemitraan ITC dengan IRE, Yogya melalui studi banding mengenai pengelolaan desa wisata binaan (2018).
- b. Kemitraan ITC dengan NSLIC Pemerintah Kanada. ITC menerima program hibah dana RIF senilai Rp. 1 Milyar dalam bentuk berbagai pelatihan dan prasarana produksi (2018).
- c. Kemitraan ITC dengan Akademisi Pengembangan Ekonomi Lokal Universitas Brawijaya Malang. Kemitraan berupa sharing session dan pembinaan berkala mengenai bisnis model, ekonomi kreatif, dan pemasaran (2018-2019).
- d. Rintisan kerjasama BUMDes Bersama (lembaga ekonomi lokal Kawasan Perdesaan) dengan PT Pos Indonesia. Saat ini masih bersifat rintisan dengan bidang yang akan dikerjasamakan adalah pemasaran dan distribusi produk (2020).

Tabel 4. Karakteristik Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kelompok Variabel	Variabel	Karakteristik Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Karakteristik Desa Sasaran Program	Lokasi Desa Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Desa dengan status IPD berkembang • Aksesibilitas dari KP ke kota memadai dengan kondisi jalan baik dan terdapat moda transportasi umum (wisata) • Ketersediaan sarana prasarana umum memenuhi kebutuhan pelayanan dan kemudahan akses oleh masyarakat tinggi
	Basis Ekonomi Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Basis ekonomi utama pertanian dengan masyarakat pertanian 38% dari total TK. • Terdapat kegiatan industri kecil dan menengah yang bergantung pada produk pertanian lokal (3000 unit UKM) • Terdapat jaringan produksi-distribusi dari desa hingga kota (pada pengembangan komoditas unggulan)
	Pola Investasi Spasial	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh desa di kawasan terbagi berdasarkan fungsi (bukan pusat-<i>hinterland</i>) • Investasi menyebar berdasarkan fungsi (dalam KP berdasarkan komoditas unggulan) • Program pembangunan berfokus pada pemenuhan sarpras pengolahan/produksi berbasis UMKM
Karakteristik Program	Karakteristik Penyampaian Program	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik penyampaian program bersifat gabungan antara <i>top down</i> dan <i>bottom up</i>. • Proses <i>bottom up</i>: peran masyarakat dan pemerintah desa pada tahap pengusulan (lokasi, komoditas dan rencana aksi) dan pengembangan komoditas unggulan. • Proses <i>top down</i>: peran pemerintah pusat dalam fasilitasi berupa program/kegiatan; peran pemerintah kabupaten dalam penetapan kawasan, penetapan RPKP dan TKPKP.

Kelompok Variabel	Variabel	Karakteristik Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam SPPN, RPKP terintegrasi dengan RPJMN, RPJM Prov, RPJM Kabupaten dan RPJMDes
	Kelembagaan dan Pembiayaan Pelaksana Program	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan lintas sektoral dan regional, terdapat di berbagai tingkat dengan beranggotakan berbagai K/L (pada tingkat pusat) dan SKPD (pada tingkat daerah), dan berbagai unsur (pada tingkat kawasan) • Pembiayaan berasal dari berbagai pihak (APBN, APBD Kab, APBDes dan Lembaga Donor)

Sumber: Analisis Penulis, 2020

b. Pembahasan Teoritik

Berkaitan dengan teori model spasial pengembangan wilayah, Mutaali (2016) menyebutkan bahwa tipologi model spasial pembangunan wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu model pusat pertumbuhan sebagai pendalaman pendekatan pembangunan dari atas, model desentralisasi territorial sebagai pendalaman pendekatan pembangunan dari bawah, dan model integrasi spasial yang mencoba mengintegrasikan dua model sebelumnya dengan memperhatikan model hubungan antara desa dan kota. Tipologi model spasial pembangunan tersebut dapat diidentifikasi melalui karakteristik implementasi kebijakan/program berupa karakteristik sasaran program (dalam hal ini “desa lokasi”) dan karakteristik penyampaian program.

Sejalan dengan teori sebelumnya, karakteristik program pembangunan kawasan perdesaan mengarahkannya masuk pada tipologi model spasial pembangunan wilayah integrasi spasial berdasarkan keterkaitan desa-kota. Rondinelli (1983) menyatakan bahwa model integrasi spasial dilakukan dengan menciptakan suatu jaringan produksi, distribusi, dan pertukaran antara desa dan kota. Oleh karena itu diperlukan desa yang memiliki kapasitas yang seimbang dalam menghadapi kota seperti aksesibilitas dan ketersediaan sarpras yang baik. dengan karakteristik desa sasaran program merupakan desa berkembang dengan aksesibilitas baik ke kota, ketersediaan sarana prasarana umum memadai, dan terdapat jaringan produksi-distribusi dan pertukaran ekonomi dari desa hingga kota besar.

Menurut Mutaali (2016), dari segi perekonomian desa, kegiatan pertanian mendominasi namun terdapat pergeseran menuju agroindustri dengan berfokus pada pengolahan pasca panen (pengolahan dan pemasaran). Hal tersebut sejalan dengan karakteristik kawasan perdesaan dimana penduduk bekerja di sektor pertanian dan non pertanian secara seimbang, terdapat kegiatan industri kecil dan menengah yang bergantung pada produk pertanian lokal, dan fokus program pada pemenuhan sarpras pengolahan/produksi dalam rangka hilirisasi komoditas unggulan perdesaan. Terkait karakteristik penyampaian program, Maulana (2015) menyatakan bahwa kekhususan karakteristik program pembangunan kawasan adalah pada pendekatannya yang berifat partisipatif sehingga cenderung memiliki pendekatan pembangunan dari bawah. Namun pada praktiknya, baik dalam proses perencanaan maupun penyelenggaraan bersifat gabungan antara *top down* dan *bottom up*. Pada sistem kelembagaan dan sistem pendanaan bersifat multi pihak dengan kelembagaan lokal sebagai pelaksana utama. Temuan tersebut sejalan dengan Andari dan Ella (2017) yang menyatakan bahwa masih terdapat unsur perencanaan yang bersifat *top down* dari pemerintah pusat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah program PKP atau pembangunan kawasan perdesaan masuk pada tipologi model pengembangan wilayah keterkaitan desa-kota dengan karakteristik desa sasaran program merupakan desa berkembang dengan aksesibilitas baik ke kota, ketersediaan sarana prasarana umum memadai, penduduk bekerja di sektor pertanian dan non pertanian secara seimbang, terdapat kegiatan industri kecil dan menengah yang bergantung pada produk pertanian lokal, program berfokus pada pemenuhan sarpras pengolahan/produksi dalam rangka hilirisasi komoditas unggulan perdesaan serta terdapat jaringan produksi, distribusi, dan pertukaran ekonomi dari tingkat desa hingga kota. Karakteristik penyampaian program baik dalam proses perencanaan maupun penyelenggaraan bersifat gabungan dari bottom up dan top down dengan kelembagaan dan pendanaan bersifat multi pihak serta kelembagaan lokal sebagai pelaksana utama.

5. REFERENSI

- Abreu, I. and Mesias, F.J. (2020). The assessment of rural development: Identification of an applicable set of indicators through a Delphi approach. *Journal of Rural Studies* Pages 578-585. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.10.045>.
- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta. Cetakan 1, Graha Ilmu.
- Andari, Rosita N., dan Ella, Susy. (2019). Pengembangan Model Smart Rural Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15 (1),41-58. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.394>
- Barraket, et. al. (2017). Classifying Social Enterprise Models in Australia. *Social Enterprise Journal*. DOI: [10.1108/SEJ-09-2017-0045](https://doi.org/10.1108/SEJ-09-2017-0045)
- Boudet, F., et. Al. (2020). Rural-urban connectivity and agricultural land management across the Global South. *Global Environmental Change* Volume 60. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101982>.
- Chen, Kunqiu., et. al. (2020). Land use transitions and urban-rural integrated development: Theoretical framework and China's evidence. *Land Use Policy*, Volume 92. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104465>.
- Creswell, J. W. (2009). *Qualitative Procedures. Research design: Qualitative & quantitative approaches*. Sage Publications, Inc.
- Dinis, et. al. (2019). Understanding The Impact of Intentions in The Adoption of Local Development Practices by Rural Tourism Hosts in Portugal. *Journal of Rural Studies*. DOI: [10.1016/j.jrurstud.2019.10.002](https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.002)
- Douglass, M. (1998). A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia. *Third World Planning Review*, 124-154.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- He, Yanhua., et. al. (2019). The spatial organization pattern of urban-rural integration in urban agglomerations in China: An agglomeration-diffusion analysis of the population and firms. *Habitat International* Volume 87 Page 54-65. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.04.003>.
- Liu, T., et. al. 2015. *Spatial patterns, driving forces, and urbanization effects of China's internal migration: county-level analysis based on the 2000 and 2010 censuses*. *J. Geogr. Sci.* doi: [10.1007/s11442-015-1165-z](https://doi.org/10.1007/s11442-015-1165-z)
- Long, H., et. al. (2016). The allocation and management of critical resources in rural China under restructuring: problems and prospects. *Journal Rural Studies*. DOI: [10.1016/j.jrurstud.2016.03.011](https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.03.011).
- Maulana, M., et. al. (2015). *Pokok Pikiran Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Jakarta, Indonesia.
- Muta'ali, L. (2016). *Pengembangan Wilayah Perdesaan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM
- Nordberg, Kenneth., et. al. (2020). Community-driven social innovation and quadruple helix coordination in rural development (Case study on LEADER group Aktion Österbotten). *Journal of Rural Studies* Volume 79 Pages 157-168. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.001>.
- Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Ijen Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2018.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Zhu, et. al. (2019). Urbanization for Rural Development: Spatial Paradigm Shifts Toward Inclusive Urban-Rural Integrated Development in China. *Journal of Rural Studies*. DOI: [10.1016/j.jrurstud.2019.08.009](https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.08.009)